

## A. Latar Belakang

Sejak dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 yang ditandai dengan perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* diharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat. Oleh karena Wajib Pajak telah diberi kepercayaan dan kemudahan oleh pemerintah dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Peran fiskus dalam *Tax Reform* hanya sebagai pengawas Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan penagihan pajak.

Tindakan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilindungi oleh payung hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Undang-undang ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang timbul.

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, adalah sebagai berikut ;

Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, menyusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pelaksanaan penagihan pajak ini diawali dengan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) oleh KPP sebagai pihak penagih, yang dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar

(SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (KPKPBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN), di samping itu Dirjen Pajak juga dapat menerbitkan surat tagihan pajak (STP).

Dengan adanya surat-surat tersebut diharapkan utang pajak segera dilunasi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar pajaknya selambat-lambatnya tujuh (7) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran SKP, maka dari pihak penagihan akan menerbitkan Surat Teguran (Berdasarkan Pasal 27 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan). Adapun yang dimaksud Surat Teguran yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya (sesuai dengan Pasal 8 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa). Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Jika Wajib Pajak masih tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat dua puluh satu (21) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa

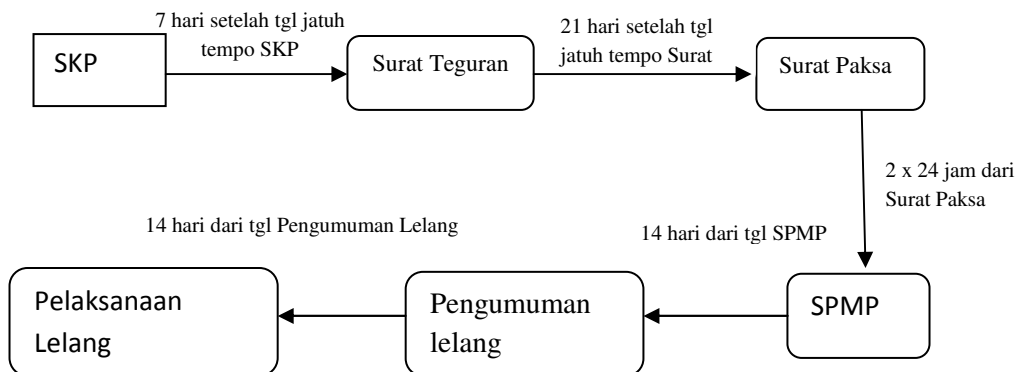
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 Ayat 12 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa: “Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Selanjutnya pada pasal 8 Ayat 1 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketetapan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak,

maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ( Lubis, 2011:305). Penyitaan dilakukan oleh jurusita dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, orang Indonesia, dikenal oleh jurusita dan dapat dipercaya.

Menurut pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jika 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, Wajib Pajak masih tidak melunasi juga utang pajaknya, maka akan dilakukan Pengumuman lelang Selanjutnya pada pasal 26 Ayat 1a dinyatakan sesudah 14 (empat belas) hari pengumuman dilakukan ternyata masih belum melunasi utang pajaknya, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Lebih jelasnya jangka waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat dilihat pada skema yang ada pada gambar 1 berikut:



*Gambar 1 Diagram Jangka Waktu Penagihan Pajak (Lubis:2011)*

Tindakan penagihan pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) oleh bidang penagihan. Diperlukan jurusita yang melakukan proses penagihan yang ditunjuk oleh petugas yang berwenang, sudah dididik, dilatih dan dilakukan sumpah. Jadi tidak semua pegawai pajak bisa menjadi jurusita. Jurusita ini bertugas melaksana tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak tersebut meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut sudah memadai, seperti melakukan pembaharuan peraturan, perubahan kebijakan, sosialisasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Bahkan sekarang ini telah ada kemudahan dengan hadirnya sistem administrasi perpajakan modern yang mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP, cukup dengan sistem *online* mereka bisa memenuhi kewajibannya. Namun, pada kenyataannya upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil, tetap saja masih banyak Wajib Pajak yang menunggak.

Di lain pihak pada saat ini pemerintah giat melakukan pembangunan, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Dengan semakin banyaknya pembangunan secara otomatis negara membutuhkan biaya yang semakin meningkat, di mana salah satu penyumbang terbanyak atas biaya pembangunan adalah pendapatan pajak. Hal ini tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan pendapatan Negara yang potensial, untuk melaksanakan aktivitas operasional agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 pemerintah mematok penerimaan pajak Rp 1.113 triliun, dengan *tax ratio* 12,38 persen. Target ini Rp 3 triliun lebih tinggi dari usulan awal Rp 1.110 triliun, oleh sebab itu pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (<http://katadata.co.id/berita>).

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di Kota Makassar.

Pada saat ini jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara mencapai 130 ribu. WP banyak yang bergerak di bidang perdagangan dan industri manufaktur, berhubung Kota Makassar merupakan kota yang memiliki pelabuhan laut dan udara berskala nasional, juga merupakan kawasan industri manufaktur. Dari Wajib Pajak yang telah terdaftar masih banyak yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.1 di mana masih ada Surat Paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut:

Tabel 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara  
Jumlah Wajib Paksa dan Surat Paksa Tahun 2013-2015

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan</b>
<b>2013</b>	<b>9.163</b>	<b>578</b>
<b>2014</b>	<b>10.103</b>	<b>628</b>
<b>2015</b>	<b>10.863</b>	<b>1.747</b>

*Sumber : Seksi Penagihan Kantor Penagihan Pajak Pratama Makassar Utara*

Berdasarkan data tabel 1 tampak jumlah lembar Surat Paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2013 ketahun 2014 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak menurun. Kemudian di tahun 2014 ketahun 2015 jumlah lembar yang diterbitkan masih bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa ditahun 2015 kesadaran masyarakat menurun lagi dalam hal membayar pajak.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo tidak juga dibayar, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pencapaian penerimaan pajak.

Berdasarkan realitas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian mana diberi judul: **“Tinjauan Atas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah penelitian ini dapat dirumuskan: Bagaimanakah proses penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan proses penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Utara

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan manfaat bagi entitas KPP Pratama Makassar Utara sebagai lokus penelitian untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja di masa yang akan datang sehingga pendapatan pajak lebih meningkat.
- b. Bisa di jadikan bahan untuk mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis.



